

THE EFFECT OF BUDGETING PERFORMANCE ON ECONOMIC GROWTH AND ITS IMPACT ON POVERTY LEVEL (A Study On Regencies and City in the Province of Papua)

Bonifasia Elita Bharanti¹
elitabharanti@gmail.com

¹ Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

Abstraksi:

Papua has been one of the provinces in Indonesia which is of the central government's concern. The government, through Special Autonomy running for 15 years, has disbursed Rp 59.51 trillion to Papua province with an expectation that all funds are used for development. Each regency and city receives 80% of the special autonomy fund, which is an addition to provincial APBD fund. This large funding should be used to improve the welfare of the people, that is the use of budgets that have an impact on economic growth and the decline of poverty levels in regencies and city throughout the province of Papua. The aim of this study to analyse the direct effect of budgeting performance on economic growth and indirect influence on poverty level. The scope of the study area covers the regencies of Merauke, Jayapura, Jayawijaya, Biak, Nabire, Yapen Islands and Jayapura City. This study utilizes data of the year 2010-2016 and it is analyzed using multiple regression. Hypothesis testing is done by T- and F-Tests. The results showed that partially budgeting performance (effectiveness, efficiency and independence) have positive yet insignificant effect on economic growth, while simultaneously it exhibits positive and significant impact on the economic growth. However, the economic growth is negatively insignificant to poverty, and does not mediate the effect of budgeting performance on poverty levels.

Kata Kunci : Budgeting Performance, Economic Growth, Poverty.

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah kinerja pemerintah sangat penting yang dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya adalah kinerja anggaran (APBD) karena penilaian kinerja anggaran sangat penting dalam kerangka penguatan otonomi daerah (Mardiasmo, 2004). Kinerja Anggaran (APBD) sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus menunjukkan kinerja yg baik sehingga dapat mendorong perkembangan perekonomian daerah yg dilihat dicerminkan dari tingkat pertumbuhan ekonominya yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dengan berkurangnya penduduk miskin, karena APBD memiliki peran sebagai alat stabilisasi, distribusi, dan alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Mahmudi, 2006).

Halim (2004) mengemukakan bahwa kinerja anggaran dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio diantaranya: rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi, pertumbuhan dan keserasian, sedangkan Mahmudi (2007) mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio desentralisasi, efektifitas dan efisiensi PAD, derajat kontribusi BUMD, *Deb service coverage ratio* dan rasio pendapatan terhadap utang. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002:19). Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Widodo (Halim, 2002) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menurut Ginting dan Rasbin (2010) menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan

dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat termasuk di golongan penduduk miskin.

BPS (2012) mengemukakan kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yg memiliki rata rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Cara pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS adalah dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi. Indikator kemiskinan menurut Bank dunia menggunakan dua kriteria dalam menentukan garis yaitu : pertama, menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2100 kalori perhari, kedua, garis kemiskinan internasional berdasarkan *Purchasing Power Parity* US\$1 dan US\$2 (Kuncoro,2010)

Hasil dari penelitian Hamzah (2008) adalah rasio kemandirian dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Maiputra (2011) menunjukkan rasio kemandirian berpengaruh secara positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Kaliti (2011) menunjukkan rasio kemandirian dan efektifitas tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efisiensi tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Annisa (2011) menunjukkan bahwa rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Wahyuniarti (2007), Ginting dan Rasbin (2008) dimana hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan penelitian Hamzah (2008), Prastyo (2010), Katili (2011), Annisa (2011) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Propinsi Papua merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang menjadi Perhatian Pemerintah saat ini. Adanya UU otonomi khusus yang sudah berjalan selama 15 tahun yang diberikan pemerintah pusat ke Propinsi Papua, Pemerintah sudah mengukurkan dana sebesar Rp 59,51 Trilyun ([www. Papatoday.com](http://www.Papatoday.com)). Seluruh dana tersebut diharapkan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di Papua. Dari dana tersebut setiap Kabupaten /Kota menerima 80% dari dana otsus yg merupakan tambahan dana APBD Propinsi. Sudah sepantasnya dana yang besar ini dipakai utk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan anggaran yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya tingkat kemiskinan di Kota/kabupaten di Propinsi Papua. Tabel 1. menunjukkan Penerimaan Dana Otsus per kabupaten/Kota Tahun 2010-2015 sbb :

**TABEL 1. PENERIMAAN DANA OTSUS (milyar)
THN 2010-2015**

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Merauke	53,470	60,588	75,754	75,754	102,513	102,583
Kab Jayapura	52,660	56,505	70,649	70,649	103,583	103,583
Jayawijaya	59,550	62,402	78,022	78,22	117,040	117,040
Nabire	51,946	55,119	69,644	69,644	100,989	100,989
Kep. Yapen	52,280	55,119	68,310	68,16	94,666	94,666
BiakNumfort	53,910	53,035	66,130	66,130	100,104	100,104
Mimika	53,910	59,162	73,971	73,971	100,956	100,956
Kota Jayapura	50,900	53,631	67,056	67,056	95,555	95,555

Sumber data: BPS, 2016

Dari Tabel 1 diatas dari tahun ke tahun dana otsus yang diterima oleh kabupaten/kota di Propinsi Papua menunjukan peningkatan dari tahun ketahun. Penerimaan yang meningkat setiap tahunnya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semakin berkurangnya penduduk miskin disetiap Kabupaten/ Kota di Papua. Realitas yang terjadi menunjukkan hal yang sebaliknya bahwa dengan meningkatnya dana otonomi khusus di Propinsi Papua garis kemiskinan berdasarkan urutan Propinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang selalu menempati posisi terbawah dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dari kinerja anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh tidak langsungnya yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Propinsi Papua yang berjumlah 29 Kabupaten/kota. Pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive random sampling* dengan kriteria pemilihan sampel adalah :

- Kabupaten/kota yang ada di Propinsi Papua yang merupakan kabupaten Induk sebelum pemekaran dan mempublikasikan data APBD beserta realisasi APBD tahun 2010-2015
- Kabupaten/kota di Papua yang memiliki data tingkat PDRB, dan kemiskinan tahun 2010-2015.

Berdasarkan kriteria diatas maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 Kabupaten /Kota di Papua: Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak, Kota Jayapura, Kabupaten Yapen, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire

B. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data keuangan APBD dan realisasinya, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan dari kabupaten/kota di Papua periode 2010 – 2016. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan website Departemen Keuangan dan Dinas Sosial.

C. Definisi Operasional

1. **Kinerja anggaran** adalah tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan dari suatu kota/kabupaten di Propinsi Papua yang diukur dengan rasio keuangan yang sbb :

- Rasio efektivitas** menggambarkan kemampuan kabupaten / kota di Propinsi Papua dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riilnya

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (\text{Halim 2004})$$

Tabel 2. Kriteria Efektifitas

Nilai	Efektifitas
> 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	cukup efektif
60%-80%	kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996

- Rasio efisiensi** adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Kabupaten /Kota di Propinsi Papua dibandingkan dengan realisasi pendapatan (penerimaan) yang diterima. Rasio efisiensi dapat diukur:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\% \quad (\text{Halim,2004})$$

Tabel 3. Kriteria efisiensi

Nilai	Efisiensi
> 100%	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat efisien

Sumber : Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996

c. Tingkat Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah tingkat kemandirian suatu kabupaten/kota di Propinsi Papua dalam memenuhi kebutuhan untuk pendanaan pembangunan dan pelayanan publiknya kepada masyarakat yang bersumber dari pajak dan retribusinya. Rasio kemandirian diukur menggunakan :

$$\text{Tingkat kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah (PAD)}}{\text{Belanja Rutin non Pegawai (BRNP)}} \times 100\% \quad (\text{Halim, 2004})$$

2. Pertumbuhan ekonomi adalah menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu yang diukur dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
3. Tingkat kemiskinan adalah rasio jumlah penduduk miskin yang ada disuatu kabupaten /kota yang diukur dengan membandingkan jumlah penduduk miskin dibagi dengan total jumlah penduduk disuatu kabupaten /kota.

D. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap perkembangan ekonomi dan juga pengaruh perkembangan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan digunakan alat uji berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, analisis regresi dan pengujian hipotesis. Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji koefisien determinasi dibantu dengan program SPSS versi 20 for windows, sedangkan untuk analisis regresi dan pengujian hipotesis dengan melihat p-value menggunakan aplikasi Data Analysis pada program Microsoft Excel.

Analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh kinerja anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dirumuskan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

- Y1 = perkembangan ekonomi
a = konstanta
b0 – b5 = koefisien regresi
X2 = variabel rasio efktivitas
X1 = variabel rasio efisiensi
X3 = variabel tingkat Kemandirian
e = error

Analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh perkembangan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dapat dirumuskan :

$$Y = a + b_0 X_0$$

Keterangan:

Y₁ = perkembangan ekonomi

a = konstanta

b₁ = koefisien regresi

X₁ = variabel kemiskinan

E. Hipotesis

H₁ : Kinerja anggaran secara parsial berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi;

H₂ : Kinerja anggaran secara simultan berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi;

H₃ : Tingkat perkembangan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a). Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil data sekunder yang diperoleh dapat dilihat tingkat pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perkembangan PDRB di delapan (8) kabupaten yang diteliti. Dari tabel 4 dibawah ini dapat dilihat bahwa tingkat perkembangan PDRB tertinggi pada tahun 2015 adalah Kabupaten Biak Numfor disusul Kab Jayawijaya sedangkan rata rata perkembangan PDRB paling rendah adalah Kabupaten Yapen dan Kabupaten Jayapura.

Tabel 4. Tingkat Perkembangan PDRB (%)

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Merauke	9,75	274,55	2,74	7,2	4,87	7,65
Kab Jayapura	11,73	7,67	6,15	6,05	6,80	4,72
Jayawijaya	454,13	11,15	17,72	4,86	8,74	58,01
Nabire	6,36	6,54	3,98	4,24	5,23	6,33
Kep. Yapen	15,79	586,51	5,35	7,07	6,39	4,5
Biak Numfort	7,52	9,25	7,66	5,68	53,52	194,79
Mimika	2,63	14,94	53,54	281,85	9,83	10,11
Kota Jayapura	49,43	281,85	9,83	10,18	10,31	8,11

Sumber data BPS, 2016

b). Rasio Penduduk Miskin

Rasio penduduk miskin di delapan (8) Kabupaten yang diteliti seperti terlihat pada tabel 5 dibawah bahwa rata rata penduduk miskin pada tahun 2015 terlihat bahwa Kab Jayawijaya memiliki penduduk miskin terbanyak disusul oleh kabupaten Yapen dan Biak Numfor dengan rasio berkisar 27-39,48%. Sedangkan Kabupaten yang memiliki penduduk miskin terendah adalah kabupaten Merauke dan Kota Jayapura dengan rasio berkisar antara 11 persen sampai dengan 12 %.

Tabel 5. Rasio Penduduk Miskin (%)

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Merauke	14,54	13,22	12,95	12,33	10,20	11,10
Kab Jayapura	18,64	18,64	17,08	17,58	14,18	14,69

Jayawijaya	41,84	39,03	39,05	41,81	39,60	39,48
Nabire	33,68	30,86	30,65	27,69	23,92	24,37
Kep. Yapen	33,54	30,76	30,35	29,32	26,39	27,70
Biak Numfort	33,61	30,31	29,84	30,26	27,44	27,23
Mimika	22,57	20,78	20,09	20,37	16,11	16,20
Kota jayapura	17,31	16,03	315,77	316,19	312,21	12,22

Sumber: data BPS , 2016

c). Tingkat Efektifitas

Tingkat efektifitas kinerja keuangan di delapan kabupaten di Propinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini . Terlihat bahwa rata-rata tingkat efektifitas pada tahun 2015 hanya 5 kabupaten yang sangat efektif dalam pengelolaan keuangannya yaitu Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Nabire , Mimika dan Kota Jayapura, Untuk yang cukup efektif adalah Kabupaten Yapen dan yang efektif adalah Kabupaten Jayapura sedangkan untuk Kabupaten yang tidak efektif dalam pengelolaan keuangannya adalah Kab Biak Numfor.

Tabel 6. Rasio Efektifitas (%)

Th. 2010-2015

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Merauke	519,213	510,593	262,372	96,258	43,433	215,780
Kab Jayapura	216,738	37,393	95,115	182,338	138,073	83,761
Jayawijaya	15,162	108,106	21,61	50,962	101,046	370,650
Nabire	87,514	29,890	39,032	22,863	22,524	281,863
Kep. Yapen	40,53	40,000	36,363	13,386	36,178	75,010
Biak Numfort	52,114	15,417	52,900	108,079	25,000	30,479
Mimika	744,723	201,718	213,83	375,293	928,908	255,254
Kota jayapura	97,315	47,366	19,596	334,091	253,968	120,729

Sumber data BPS , 2016

1.4. Tingkat Efisiensi

Dilihat dari Tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangannya diatas 90 % sehingga dapat disimpulkan bahwa rata rata kurang efisien dalam pengelolaan keuangannya, sedangkan Kabupaten Merauke, Kab. Jayawijaya dan Kab Mimika belum efisien dalam pengelolaan keuangannya.

Tabel 7. Rasio Efisiensi (%)

Th. 2010-2015

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Merauke	21,17	211,71	131,33	108,51	101,34	101,970
Kab Jayapura	99,85	100,52	102,96	102,48	88,65	97,090
Jayawijaya	47,76	84,38	87,8	87,27	102,31	120,870
Nabire	186,85	76,36	146,88	104,23	110,83	94,070
Kep. Yapen	78,83	98,35	99,57	98,99	108,33	90,000
Biak Numfort	84,77	94,96	114,53	89,69	76,87	98,900
Mimika	81,87	99,46	99,51	99,49	98,57	103,605
Kota jayapura	99,85	99,47	152,47	97,57	75	93,090

Sumber data BPS , 2016

1.5. Tingkat Kemandirian

Bila dilihat dari tingkat kemandirian daerah (tabel 8) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hampir seluruh daerah kabupaten yang diteliti di Propinsi Papua belum mandiri . Ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah yang bersumber dari pendapatan daerahnya sendiri belum mampu dalam membiayai pengeluaran rutinnya sehingga tingkat ketergantungan pada anggaran dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

**Tabel 8. Tingkat Kemandirian
Th. 2010 - 2015**

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Merauke	46,78	39,2	22,19	34,47	36,93	30,38
Kab. Jayapura	9,583	8,416	8,378	11,38	10,99	15,18
Jayawijaya	8,275	5,185	5,21	5,708	5,408	13,53
Nabire	3,235	1,365	1,379	3,405	2,861	4,945
Kep. Yapen	4,862	3,968	4,318	5,16	5,9	11,21
Biak Numfort	1,932	2,48	2,503	2,596	1,84	1,931
Mimika	52,47	55,96	20,45	52,00	57,27	83,71
Kota Jayapura	17,28	20,78	13,18	18,73	18,71	26,82

Sumber data BPS, 2016

1. Uji Koefisien Determinasi

a. Model Regresi Pertama

Hasil Uji Model Regresi pertama dengan variabel bebas adalah ratio efesinsi, ratio efektivitas dan ratio ketergantungan dan variabel terikatnya adalah ratio pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan tabel 5.2 diatas, dimana nilai adjusted R2 pada model regresi pertama dapat dilihat pada tabel diatas. Dari tabel tersebut diperoleh nilai R Square sebesar 0,08. Hal ini berarti kemampuan rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio kemandirian dalam menjelaskan variasi variabel dependen pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,008% atau 0,8% sedangkan 99,2% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.

b. Model Regresi Kedua

Hasil Uji Model Regresi Kedua dengan variabel bebas adalah ratio pertumbuhan ekonomi dan variabel terikatnya adalah ratio kemiskinan sebagai berikut.

**Tabel 9.
Model Regresi Kedua**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.088 ^a	.008	-.014	9.59323	.600

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan

b. Dependent Variable: kemiskinan

Tabel 5 diatas menunjukkan, nilai adjusted R2 pada model regresi kedua dapat dilihat pada tabel diatas. Dari tabel tersebut diperoleh nilai R Square sebesar 0,008. Hal ini berarti rasio pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan variasi variabel dependen kemiskinan hanya sebesar 0,008% atau 0,8% sedangkan 99,2% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.

c. Model Regresi Ketiga

Hasil Uji Model Regresi Ketiga dengan variabel bebas adalah ratio efisiensi, ratio efektivitas dan ratio ketergantungan ekonomi dan variabel terikatnya adalah ratio kemiskinan sebagai berikut.

Tabel 10.
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.478 ^a	.229	.176	8.64720	.750

a. Predictors: (Constant), ketergantungan, efisiensi, efektif

b. Dependent Variable: kemiskinan

Tabel 6 diatas menunjukkan, nilai adjusted R2 pada model regresi ketiga dapat dilihat pada tabel 5.4 diatas. Dari tabel tersebut diperoleh nilai R Square sebesar 0,229. Hal ini berarti rasio kinerja keuangan yang meliputi efosiensio, efektif dan ketergantungan mampu menjelaskan variasi variabel dependen kemiskinan hanya sebesar 0,229 atau 22,9% sedangkan 77,1% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.

2. Analisa Regresi

Dari hasil perhitungan statistik diperoleh hasil sbb :

Tabel 11.
Hasil Persamaan Regresi Pertama

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	53.994	62.246		.867	.390
Efisiensi	.054	.573	.014	.094	.925
Efektif	.005	.081	.012	.066	.947
kemandirian	-.581	1.091	-.096	-.533	.597

a. Dependent Variable: pertumbuhan

Berdasarkan tabel.7 analisa regresi pertama di atas jika dimasukkan kedalam model regresi pertama maka diperoleh hasil sebagai berikut: $52,994 + 0,054X_1 + 0,005X_2 - 0,581X_3$. Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya konstanta adalah 52,994, artinya apabila variabel independen yaitu rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio ketergantungan tidak mengalami perubahan atau tetap maka besarnya pertumbuhan ekonomi adalah 53,994%. Sedangkan jika nilai rasio efisiensi naik sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,054% dengan asumsi variabel lain yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan tidak mengalami perubahan atau tetap. Jika nilai rasio efektivitas naik sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0,005% dengan asumsi variabel lain yaitu rasio efisiensi dan ratio ketergantungan tidak mengalami perubahan atau tetap. Dan jika rasio ketergantungan mengalami kenaikan sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,581% dengan asumsi rasio efisiensi dan rasio efektivitas tidak mengalami perubahan atau tetap

Tabel 12.
ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4788.313	3	1596.104	15,453	.0,013 ^b
Residual	571098.968	44	12979.522		
Total	575887.281	47			

a. Dependent Variable: pertumbuhan

b. Predictor: (constan) kemandirian, efisiensi, efektifitas

Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa secara simultan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektifitas, rasio efisiensi dan kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan nilai F hit 15,453 dengan tingkat signifikansi 0,013 lebih kecil dari alfa 0,05. Dengan demikian hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima yaitu Kinerja keuangan (efektifitas, efisiensi dan kemandirian secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 13.
Hasil Persamaan Regresi Kedua

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23.869	1.528		15.620	.000
Pertmbhn	-.008	.013	-.088	-.599	.552

a. Dependent Variable: kemiskinan

Berdasarkan tabel 9 analisa regresi kedua di atas jika dimasukkan kedalam model regresi maka diperoleh hasil sebagai berikut: $Y = 23,869 - 0,008 X$. Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya konstanta adalah 23,869, artinya apabila variabel independen yaitu rasio pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perubahan atau tetap maka besarnya kemiskinan adalah 23,869%. Sedangkan jika nilai rasio pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka kemiskina akan berkurang sebesar 0,008%.

Tabel 14. Hasil Persamaan Regresi Ketiga

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	27.920	4.725		5.910	.000
efisiensi	-.003	.043	-.008	-.060	.952
efektif	-.004	.006	-.101	-.635	.529
kemandirian	-.216	.083	-.415	-2.614	.012

a. Dependent Variable: kemiskinan

Berdasarkan tabel 10 analisa regresi ketiga di atas jika dimasukkan kedalam model regresi maka diperoleh hasil sebagai berikut: $22,920 - 0,003X_1 - 0,004X_2 - 0,216X_3$. Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya konstanta adalah 22,820, artinya apabila variabel independen yaitu rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio ketergantungan tidak mengalami perubahan atau tetap maka besarnya kemiskinan adalah 22,820%. Sedangkan jika nilai rasio efisiensi naik sebesar 1% maka kemiskinan akan turun sebesar 0,003% dengan asumsi variabel lain yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan tidak mengalami perubahan atau tetap. Jika nilai rasio efektivitas naik sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,004% dengan asumsi variabel lain yaitu rasio efisiensi dan rasio kemandirian tidak mengalami perubahan atau tetap. Dan jika rasio kemandirian mengalami kenaikan sebesar 1% maka kemiskinan akan turun sebesar 0,216% dengan asumsi rasio efisiensi dan rasio efektivitas tidak mengalami perubahan atau tetap.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Efisiensi, Efektifitas dan Kemandirian secara Parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hipotesa pertama menyatakan bahwa Ratio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan pengujian dengan melihat nilai signifikan dibandingkan dengan alfa 5% atau 0,05. Hasil pengujian pada tabel 5 di atas dimana nilai signifikansi untuk variabel rasio efisiensi diperoleh nilai sebesar 0,925 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio efisiensi positif tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesa pertama tidak terbukti untuk itu di tolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hamzah (2008) dan Annisa (2011), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil penelitian ini salah satu penyebabnya adalah perbedaan sampel penelitian dan tahun pengamatan. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi masing-masing kota/kabupaten di Provinsi Papua rata-rata selama 5 tahun memiliki nilai ratio efisiensi lebih diatas 100%, dimana hal ini berarti daerah tersebut tidak efisien dalam membelajakan pendapatannya dimana pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Papua masih kurang efisien atau bahkan tidak efisien hal ini disebabkan karena tingginya belanja rutin terutama berkaitan dengan belanja pegawai. Sedangkan sumber pendapatan relatif terbatas sehingga tidak mampu menutupi pengeluaran daerah yang ada.

b. Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio Efektifitas mencerminkan tingkat pencapaian hasil atau realisasi dari target yang ingin dicapai. Hipotesa pertama menyatakan bahwa ratio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh rasio efektif terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan pengujian dengan melihat nilai signifikan dibandingkan dengan alfa 5% atau 0,05. Pada tabel 5.5 diatas menunjukkan hasil nilai signifikansi untuk variabel rasio efektivitas sebesar 0,947 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio efektivitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, dengan demikian hipotesa ini ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Annisa (2011), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hampir seluruh kabupaten/kota mempunyai realisasi yang belum efektif, karena perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah . Ini mengindikasikan bahwa daerah-daerah secara umum di Papua belum mampu menggali potensi sumber potensi penerimaan daerah yang ada dengan sumber daya yang dimilikinya sehingga diperoleh selama lima tahun terakhir dimana sebagian besar daerah (56,25%) memiliki tingkat efektivitas dibawah 100%.

c. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesa ketiga menyatakan bahwa ratio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh rasio ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan pengujian dengan melihat nilai signifikan dibandingkan dengan alfa 5% atau 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel rasio ketergantungan sebesar 0,597 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, dengan demikian hipotesa di tolak. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa secara umum hampir seluruh kabupaten di Propinsi Papua yang diteliti belum menunjukkan kemandiriannya dalam memenuhi kebutuhan untuk pendanaan pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusinya. sehingga tidak terlalu berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Sumber pendanaannya masih tergantung dari anggaran pemerintah pusat yang sifatnya relatif terbatas.

3. Pengaruh Kinerja Keuangan (efisiensi, Efektifitas, Kemandirian) secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesa keempat menyatakan bahwa kinerja keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Untuk membuktikan dilakukan pengujian dengan melihat Tabel Anova dimana nilai sig lebih kecil dibandingkan dengan alfa 5% atau 0,05. Pada pengujian regresi yang kedua diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan demikian hipotesa kelima di terima. Hasil ini menunjukkan bahwa bila anggaran (APBD) yang ada digunakan secara efektif dan efisien serta setiap daerah memperkuat tingkat kemandiriannya maka akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu penggalian penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari PAD perlu digali lebih intensif sesuai dengan potensi yang ada sehingga mampu untuk membiayai semua keperluan daerah maka dengan sendirinya tingkat kemandirian akan bertambah dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan.

Hipotesa kelima menyatakan bahwa ratio pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh rasio pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, dilakukan pengujian dengan melihat nilai signifikan dibandingkan dengan alfa 5% atau 0,05. Pada pengujian regresi yang kedua diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,552 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan, dengan demikian hipotesa keempat pada persamaan regresi kedua di tolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hamzah (2008), Prastyo (2010), Maiputra (2011) dan Anissa (2011) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil penelitian dengan hasil penelitian Hamzah disebabkan karena perbedaan sampel penelitian, dan periode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di beberapa kabupaten di Papua tidak mencerminkan bahwa tingkat kemiskinannya menurun hal ini disebabkan karena sektor sektor yang digarap pemerintah daerah masih terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana fisik yang belum dirasakan dampaknya pada masyarakat dalam jangka pendek sehingga belum mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan tingkat kesejahteraannya, karena sebagian besar program yang ada belum seluruhnya dapat menyentuh masyarakat yang ada dipelosok pelosok (pedalaman) yang jauh dari jangkauan pemerintah karena letak geografisnya dan medan yang sangat sulit.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial tingkat pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten di Propinsi Papua tidak dipengaruhi oleh kemandirian daerah, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran.
2. Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten di Propinsi Papua dipengaruhi oleh kemandirian daerah, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran.
3. Pertumbuhan ekonomi yang ada tidak berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan di beberapa Propinsi di Papua.

B. Saran

1. Kedepan Pemerintah Daerah harus lebih memprioritaskan pengembangan sektor sektor produktif yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerahnya sehingga lebih berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakatnya.
2. Pemerintah daerah harus mampu menggali lebih banyak sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial dapat dilakukan secepatnya dengan menyiapkan peraturan daerah yang ada.
3. Mengurangi pengeluaran daerah yang sifatnya rutin dengan melakukan analisis kebutuhan SDM Pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan potensi penerimaan daerahnya .

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Badan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- [2]. Annisa, Ghina Rufaidah, (2011) "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Kemiskinan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Antecedent (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur)" Fakultas Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- [3]. BPS. 2012. Papua Dalam Angka 2007-2011. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- [4]. Ghozali, Imam, (2005) Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- [5]. Halim, Abdul, (2004) Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN Yogyakarta
- [6]. Hamzah, Ardi, (2008) "Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)" Jurnal SNA XI Pontianak.
- [7]. Katili, Chitra Yuliasihri, (2011) "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan IPM (Studi Kasus Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah)" Fakultas Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- [8]. Mahmudi, (2007) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIMYKPN Yogyakarta
- [9]. _____ (2011) Akuntansi Sektor Publik, UII Press Yogyakarta
- [10]. Maiputra, Robby, (2011) "Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Kemiskinan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Investasi Di Provinsi Jambi", Skripsi Fakultas Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- [11]. Mardiasmo, (2002) Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset Yogyakarta
- [12]. Prastyo, Adit Agus, (2010) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)", Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang (tidak dipublikasikan)
- [13]. Todaro, Smith (2004) Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Edisi ketujuh, Ghalia Indonesia,
- [14]. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- [15]. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 64 (2) Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- [16]. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- [17]. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- [18]. Peraturan Pemerintah N0 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah